

---

# JURNAL LAWNESIA

Volume 1 (1), Juni 2022, 38 – 41

E-ISSN: 2829-7873

---



## ***THE URGENCY OF DEVELOPING THE INDEPENDENT CURRICULUM LEARNING MERDEKA CAMPUS (MBKM) ACCORDING TO THE PROVISIONS OF LAW NUMBER 20 OF 2003 CONCERNING THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM***

### **URGENSI PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

**Cahya Andika**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
Cahyad300@gmail.com

**Lelly Muridi Zham-Zham**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
lelly.mzz@gmail.com

#### ***Abstrak***

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah mendorong mahasiswa dalam menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan dengan bidang keahliannya, sehingga siap bersaing dalam dunia global. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka tempuh berdasarkan keinginan sendiri. Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi semakin otonom dan fleksibel. Pendidikan selalu mengupayakan terciptanya peserta didik yang selalu melakukan pembaharuan setiap waktu. Tidak hanya berpendidikan tinggi akan tetapi mampu menjadi agen perubahan dalam lingkup kecil maupun besar. Dari perubahan dan inovasi yang dihasilkan tersebut mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan suatu bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan menurut Kirk dan Miller.

**Kata Kunci : Urgensi, Pengembangan Krikulum, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).**

**Abstract**

*The objective of the Independent Learning Campus policy is to encourage students to master various fields of science with their fields of expertise, so that they are ready to compete in the global world. This policy provides an opportunity for students to choose the courses they will take based on their own wishes. The implementation of the Independent Learning Policy on the Independent Campus encourages the learning process in higher education to be more autonomous and flexible. Education always strives for the creation of students who always make improvements at all times. Not only able to be highly educated but able to become agents of change in small and large scope as well. From the changes and innovations produced, they are able to provide maximum contribution to the progress of a nation that has quality human resources. In writing this paper, the author uses a qualitative research method using a library approach. According to Kirk and Miller.*

**Keywords: Urgency, Independent Curriculum Independent Learning Independent Campus.**

**1. PENDAHULUAN**

Pada hakikatnya pengembangan kurikulum merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian nilai-nilai umum, konsep-konsep, masalah dan keterampilan yang akan menjadi isi kurikulum yang disusun dengan fokus pada nilai-nilai tadi. Adapun selain berpedoman pada landasan-landasan yang ada, pengembangan kurikulum juga berpijak pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.

Pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup dengan baik dalam masyarakatnya, mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidupnya sendiri, serta berkontribusi

secara bermakna dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas masyarakat dan bangsanya.<sup>1</sup>

Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum harus sesuai dengan falsafat dan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang menggambarkan pandangan hidup suatu bangsa. Tujuan dan pola kehidupan suatu negara banyak ditentukan oleh sistem kurikulum yang digunakannya, mulai dari kurikulum taman kanak-kanak sampai dengan kurikulum perguruan tinggi. Berdasarkan topik pembahasan di atas, penulis tertarik mengangkat judul: **“URGENSI PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) MENURUT KETENTUAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003**

---

<sup>1</sup>Fattah, Nanang, Manajemen Berbasis Sekolah, Strategi Pemberdayaan Sekolah dalam rangka Peningkatan Mutu dan

Kemandirian, (Bandung : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000), hlm. 1

## TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL”.

### B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi atas pengembangan kurikulum MBKM bagi Perguruan Tinggi menurut ketentuan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional?

### C. Tujuan

1. Untuk mengetahui urgensi pengembangan kurikulum MBKM pada Perguruan Tinggi menurut ketentuan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

### D. Manfaat

1. Secara Teoritis  
Penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang urgensi kurikulum MBKM di Perguruan Tinggi.
2. Secara Praktis  
Penulisan ini dapat menjadi salah satu kajian tentang urgensi kurikulum MBKM bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi.

## 2. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan kajian ini menerapkan metode yang bersifat yuridis normatif (hukum normatif)<sup>2</sup> dimana dalam metode ini dilakukan pengkajian serta dianalisis berbagai aturan dan norma yang diterapkan dan diatur dalam undang-undang, *case law* ataupun suatu kontrak. Selanjutnya, pendekatan yang diterapkan ialah pendekatan yang terkait dengan perundang-undangan (*Statute Approach*).<sup>3</sup> Pelaksanaan pendekatan ini melalui penelaahan

seluruh peraturan perundang-undangan dan keterkaitannya dengan seluruh permasalahan hukum yang sedang dilakukan penanganan.

## 3. PEMBAHASAN

### 1. Urgensi Pengembangan Kurikulum MBKM pada Perguruan Tinggi menurut Ketentuan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dinamika dan perubahan di bidang pendidikan yang dirasakan saat ini begitu dinamis, yaitu adanya kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat, model pembelajaran harus mampu menjawab tantangan sehingga adanya pergeseran peran guru atau dosen bukan sekedar *central learning*. Landasan sosiologi pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek dan atau studi pendidikan yang bersumber sosiologi. Sosiologi pendidikan meliputi : interaksi guru - guru dengan siswa, dinamika kelompok kelas atau sekolah, struktur dan fungsi pendidikan, serta sistem - sistem masyarakat dan pengaruhnya terhadap pendidikan, bagaimana implementasi landasan sosiologis pendidikan di Indonesia, bagaimana implikasi landasan sosiologis pendidikan terhadap pendidikan Indonesia.

Pengembangan kurikulum selalu dilakukan oleh dunia pendidikan sesuai dengan tuntutan dari perkembangan teknologi dan dinamika penduduk yang dilaksanakan oleh suatu lembaga pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah terminologi dalam kurikulum itu sendiri.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 4.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 190.

<sup>4</sup>Baharun, Hasan, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik, (Probo-linggo: Pustaka Nurja, 2017), hlm. 14.

Perguruan Tinggi diharapkan berkomitmen menyediakan dan memfasilitasi Program MBKM sebagaimana yang diamanatkan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 maupun yang dijelaskan dalam Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diterbitkan Kemendikbud. Dengan demikian ada Sembilan Program MBKM, yaitu :

1. Pertukaran Mahasiswa;
2. Praktik Kerja Profesi;
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
4. Penelitian/Riset;
5. Proyek Kemanusiaan;
6. Kegiatan Wirausaha;
7. Studi/Proyek Independen;
8. Proyek/Membangun Desa, dan
9. Pelatihan Bela Negara.

Implementasi dari kurikulum MBKM pentingnya perumusan kurikulum yang maksimal karena melibatkan mitra untuk mencapai hasil pembelajaran di perguruan tinggi. Dalam pelaksanaannya perguruan tinggi melibatkan pihak eksternal dalam merumuskan kurikulum sehingga hasil lulusannya bisa diterima di dunia kerja. Ada beberapa program yang disepakati yaitu adanya: pertukaran pelajar, magang, praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/KKN.

Kebijakan MBKM yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

#### 4. PENUTUP

Kurikulum ialah perangkat yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Penyusunan kurikulum dilakukan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Tujuan kurikulum Mer-

deka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong mahasiswa menguasai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Implementasi kurikulum MBKM untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi, dengan pendidikan sistem pembelajaran berbasis OBE (*Outcome Based Education*) sehingga lulusannya fokus terhadap capaian pembelajaran yang selaras sesuai dengan disiplin ilmu. Kurikulum MBKM ialah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU:

- Baharun Hasan. 2017. Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik. Probolinggo : Pustaka Nurja.
- Fattah, Nanang. 2000. Manajemen Berbasis Sekolah, Strategi Pemberdayaan Sekolah dalam rangka Peningkatan Mutu dan Kemandirian, Bandung : Kemdikbud.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.